

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat diberikan setelah menjalani praktek kerja profesi di Apotek Libra yaitu :

- a. Apotek Libra diharapkan dapat meningkatkan pemberian KIE kepada pasien agar pasien mengerti penggunaan obat yang benar dan dapat meningkatkan kepatuhan pasien sehingga dapat memberikan efek terapi yang diharapkan.
- b. Apotek Libra diharapkan dapat meningkatkan pelayanan *Patient Medication Record* (PMR).
- c. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan informasi kepada pasien dan pasien juga mengerti apa yang disampaikan oleh calon apoteker.
- d. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya meningkatkan ketelitian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dengan tujuan untuk meminimalkan kesalahan penyerahan atau pemberian obat kepada pasien.
- e. Mahasiswa calon apoteker harus berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKP di apotek agar dapat memperoleh informasi yang optimal sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2016, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggolongan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Lacy, F. C., Armstrong, L. L., Goldman, P. M. and Lance, L. L., 2009, *Drug Information Handbook, ed. 17th*, American Pharmacists Association, North American.
- Monthly Index of Medical Specialities (MIMS), Inc., [2019]., *MIMS Drug Information System*. [Online]. <https://www.mims.co.uk/drugs/diabetes/oral-and-parenteral-hypoglycaemics/januvia/>, [2019, Januari 2].
- McEvoy, G.K., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2002, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, *Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/ Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/Menkes/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L., 2015, *Manajemen Farmasi tentang Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi*, Penerbit Universitas Airlangga.
- Ikatan Apoteker Indonesia, 2014, *Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Papan Nama Praktik Apoteker*, Ikatan Apoteker Indonesia, Jakarta.

Sweetman, S. C., 2009, *Martindale The Complete Drug Reference*, ed 36th, The Pharmaceutical Press, London.

Whalen, K., Finkel, R., Panavelil, T.A., 2015, *Lippincot Illustrated reviews : Pharmacology*, ed 6th, Wolters Kluwer, China.